

**IMPLEMENTASIPERATURANDAERAHPALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) PADA KELURAHAN SUKAJAYA
KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 6)**

OLEH :

NAMA : M. THOMAS EDISON

NIM : 20.11.234

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

M. Thomas Edison, 2024, Implementation of Palembang Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Community Empowerment Institutions (LPMK) in Sukajaya Village, Sukarami District, Palembang City (Case Study Article 6). Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Supervisor (I) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Sc.

The Village Community Empowerment Institution (LPMK) is an institution or forum formed on the initiative of the community as a partner for the village head in accommodating and realizing the aspirations and needs of the community in the field of development. One of the sub-district agencies that implements regulations regarding LPMK is Sukajaya Subdistrict, Sukarami District, Palembang City. It is hoped that the Sukajaya Village Community Empowerment Institution (LPM), Sukarami District, can help accelerate or make development more effective in the subdistrict and national development in general.

The method used in this research is qualitative research. The qualitative research method is a method that must be carried out by researchers through a series of procedures and stages in carrying out research activities with the aim of solving problems or finding answers to a problem.

The results of the research show that the implementation of Palembang Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Community Empowerment Institutions (LPMK) in Sukajaya Village, Sukarami District, Palembang City (Case Study Article 6) has generally been implemented well. Judging from communication, outreach has been carried out to the community, adequate human resources are available, the attitude of implementers is very enthusiastic and there is a clear bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Village Community Empowerment Institution (LPMK)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang.

Kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah pemerintahan daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan kelurahan. konsep Negara sejahtera

(welfare state) sesungguhnya sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka. Konsep ini merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepadaarganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat memberikan wadah bagi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang terdapat di tingkat wilayah kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh demi terciptanya pembangunan secara partisipatif baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Implementasi menentukan pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengganti keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterimakan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah dibidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti yang termuat dalam pasal 6 Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu instansi kelurahan yang menerapkan peraturan tentang LPMK adalah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami diharapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pembangunan di kelurahan dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal ini sesuai dengan harapan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami yaitu terwujudnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami yang mendukung program pemerintah, umumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya Pemerintah Kota Palembang untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan bagi pembangunan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, terlihat adanya indikasi masalah bahwa pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) antara lain :

1. Tidak efektifnya penyampaian aspirasi masyarakat, hal tersebut dilihat dari belum maksimalnya waktu pertemuan antara masyarakat dan petugas LPMK dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga belum menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal tersebut dilihat dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab mengenai kegiatan LPMK seperti gotong royong dan karang taruna serta kurangnya sosialisasi pengurus LPMK kepada masyarakat mengenai LPMK itu sendiri.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga**

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut ; Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6).

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014:163), dimana implementasi diartikan sebagai menyelesaikan pekerjaan dan sedang mengerjakan. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn dalam Wahab (2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2011: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.

4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah.
5. Dilakukan pemantauan terus menerus.
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Harsono, (2012:67) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya,.
- b. Proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model Implementasi

Menurut Keban, (2014:63) Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan, yaitu yang pertama, implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas; dan kedua, implementasi yang berpola paksa dan mekanisme pasar. Model *mekanisme paksa* adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara dimana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Model ”Atas Bawah” berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana

partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya dari bawah ke atas bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Diantara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2014: 165) :

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran "puncak ke bawah" dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan,

keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut.

Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan untuk selanjutnya dapat diputuskan untuk direvisi atau tidak.

3. Model Implementasi Kebijakan dari Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Model ini berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Menurut kedua pakar ini, untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada..
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggipula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai..
6. Hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan

kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan adalah syarat bagi efektivitas implementasi kebijakan.

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

4. Model Edward III

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu, *communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucatic structures*.

Adapun Model Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi dari George C. Edward III.

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

b. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang

amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

c. Faktor Disposisi (sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi..

Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi :

- a. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur.
- b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan kepala desa.

Kelurahan

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah. Definisi konsep kelurahan juga ditegaskan oleh Daljoeni yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa inggris “empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata

(power) (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- d. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas LPMK adalah:

1. LPMK bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 membahas fungsi LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikannya, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tinjauan Pembangunan

Pengertian tentang “pembangunan” sebagai mana telah dikemukakan dalam rumusan (Mardikanto, 2009:6) di atas, memberikan arahan bahwa:

- a. Pembangunan, merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, dalam upayanya untuk terus menerus memperbaiki mutu-hidup masyarakat dan individu-individu yang menjadi anggotanya.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, kegiatan pembangunan senantiasa memanfaatkan teknologi yang terpilih yang diyakini paling “baik” dalam arti berhasil guna (mangkus) dan berdaya-guna (sangkil).
- c. Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu yang menjadi anggotanya tersebut terkandung pemahaman tentang upaya pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah yang akan dihadapi atau yang telah dirasakan oleh pelaku-pelaku pembangunan tersebut.

Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Kerangka Berpikir

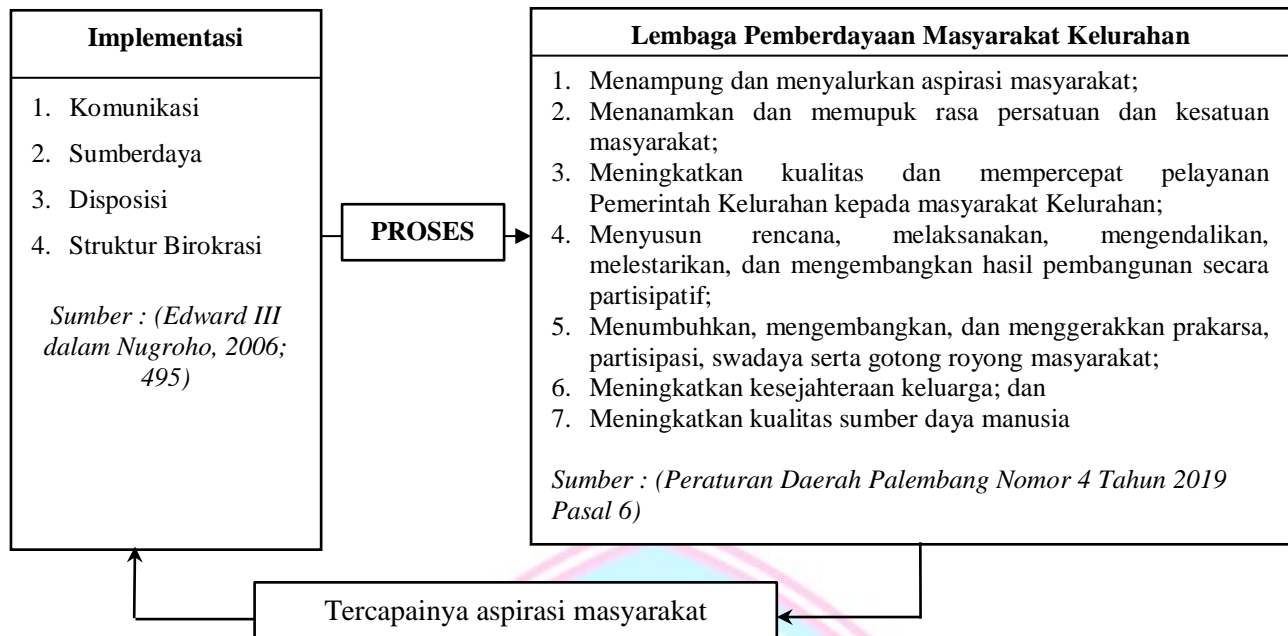
Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono (2012:60), mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Model kebijakan yang digunakan oleh dalam kerangka berpikir adalah model implementasi Edward III dalam Nugroho, (2006:495) karena

kelebihan dari kebijakan ini ialah kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi yang sederhana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar Kerangka Berpikir



Sumber : Dikelola oleh Peneliti

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo (2011:22) “Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6).

Definisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:32). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2005:46) bahwa definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Variabel dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, adapun *Variabel* dan Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (Edward III dalam Nugroho, 2006; 495)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6)	1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan; 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat; 6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Informan Penelitian

Andi (2010:147) menjelaskan bahwa, “informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.”

Sumber informasi adalah informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka adalah Lurah, Perangkat Lurah dan Masyarakat. Adapun Informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Lurah Kelurahan Sukajaya	1 Orang
2.	Kasi PMK	1 Orang
3.	Ketua LPMK	1 Orang
4.	Sekretaris LPMK	1 Orang
5.	Staf LPMK Bagian Bina Masyarakat	1 Orang
6.	Warga Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasar konsep teknis yang digunakan, keinginan pribadi, karakteristik empiris dan sebagainya. Menurut Sutopo (2002:21) data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu: Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka dilengkapi format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat

langsung terhadap objek penelitian seperti pendekatan mendalam terhadap lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat untuk mendapatkan data utama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6).

2. Teknik Wawancara

Wawancara ini merupakan langkah kedua setelah observasi percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang menyatakan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan informasi penjelasan secara langsung sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya..

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah penulis melihat beberapa jumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

4. Teknik Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustakanya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). penetapan studi pustaka tersebut berupa dokumen-dokumen, wawancara dari lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini fokus ditunjukkan kepada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6).

Hasil penelitian merupakan input yang didapatkan oleh penulis melalui beberapa teknik penelitian yang digunakan sebagai dasar penulis untuk mengetahui indikasi-indikasi dan juga

fenomena yang terjadi pada tempat yang akan diteliti. Adapun disini penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian dan informasi guna untuk menyempurnakan karya tulis skripsi ini, penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada objek yang akan penulis teliti. penulis secara langsung datang ke kantor lurah Sukajaya dapat melihat dan mempelajari secara langsung fenomena apa dan indikasi-indikasi apa yang ada pada Kelurahan Sukajaya.

Setelah penulis melakukan observasi, penulis kemudian melakukan Wawancara yang merupakan proses komunikasi dan sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Disini penulis mencoba melakukan wawancara dengan melibatkan beberapa informan sebagai dasar penelitian yang dilakukan.

Ada 2 konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu konsep Implementasi dan konsep LPMK. Berikut hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

A. Implementasi

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajaya yang disampaikan oleh pimpinan dalam hal ini Lurah Sukajaya kepada Pegawai melalui koordinasi yang dijalankan telah berjalan optimal, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan hal pokok pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program ini, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial (anggaran). Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Sumber daya manusia yang ada pada LPMK Sukajaya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Anggota LPMK harus dibina dan mengikuti pelatihan melaksanakan fungsi LPMK, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di LPMK Sukajaya yaitu terdapat dalam pendidikan anggota LPMK masih berpendidikan SMA dan sumber daya yang ada harus diikutkan pelatihan.

3. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika lingkungan pelaku pelaksana kebijakan didominasi orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, maka sikap dan perilaku di lingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksana kebijakan pada arah yang benar. Sikap dan perilaku positif juga perlu mendapat reward atau sebaliknya *funishment* bagi yang lalai sehingga menimbulkan spirit yang dapat

meningkatkan efektifitas pelaksanaan guna mewujudkan kebijakan.

Gambar Pertemuan dan Rapat Pihak LPMK dengan masyarakat Kelurahan Sukajaya



Sumber : Kantor Kelurahan Sukajaya

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis menyatakan bahwa indikator Disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2019 tentang fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajaya yang dilaksanakan oleh LPMK dalam hal ini anggota LPMK Sukajaya kepada masyarakat melalui kekeluargaan, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di masyarakat yaitu pengurus LPMK merespon apa yang menjadi keinginan warga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan yang mengatur susunan tugas dan fungsi organisasi birokrasi yang berpedoman pada standar operasional prosedur dan mekanisme. Dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mekanisme tata kelola dan disusun sebagai teknis atau sistem pelaksanaan kebijakan yang terencana. Dengan demikian, mekanisme tata kelola fungsi merupakan pedoman untuk mewujudkan visi kebijakan dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau pihak-pihak diluar organisasi.

Gambar Pembagian tugas oleh Petugas LPMK Kelurahan Sukajaya



Sumber : Kantor Kelurahan Sukajaya

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Sukajaya. Untuk Struktur Birokrasi pada LPMK Sukajaya masih belum memahami, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di Struktur Pengurus LPMK Sukajaya yaitu seluruh Struktur Birokrasi harus diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti mengikuti pelatihan.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6)

Konsep kedua yang digunakan penulis adalah tentang LPMK. LPMK adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Dalam penelitian ini berisi tentang hasil penelitian mengenai fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian dan hasil observasi di lapangan. Berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan melalui pertemuan warga secara berkala dan insidental.

Gambar Warga Masyarakat Kelurahan Sukajaya sedang Berkumpul untuk Menyalurkan aspirasi kepada pihak kelurahan



Sumber : Kelurahan Sukajaya

Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak masyarakat dalam mengutarakan kehendaknya dan dalam pelaksanaannya LPMK bersama pihak kelurahan telah mengadakan rapat dan pertemuan sebagai sarana masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya. Namun dari hasil pengamatan penulis bahwa masih terdapat keluhan-keluhan warga yang menyatakan bahwa masih ada aspirasi dari warga yang belum terwujud atau belum sesuai harapan.

2. Menanamkan dan Memupuk Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Penanaman dan pemupukan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong pertemuan warga secara berskala dan insidental.

Gambar Kegiatan Gotong Rotong yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sukajaya



Sumber : Kantor Kelurahan Sukajaya

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar pengurus LPMK, pihak kelurahan dan warga, LPMK bersama pihak kelurahan bekerjasama membuat suatu pertemuan yang dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan demi terciptanya rasa persatuan.

3. Meningkatkan Kualitas dan Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat kelurahan anantara lain melalui sumber daya dan program yang prima diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Hasil diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dari pihak kelurahan bersama LPMK sudah cukup baik, dengan terciptanya sinergitas antara LPMK dan pihak kelurahan dalam menjalankan setiap kegiatan, walaupun masih ada beberapa aspirasi warga yang belum terwujud.

4. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Mengendalikan, Melestarikan dan Mengembangkan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana, melaksanakan, Mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, perencanaan pembangunan,

pelaksanaan, pengembangan, dan pemeliharaan telah dilakukan secara partisipatif oleh pihak LPMK bersama kelurahan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam memberikan masukan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan, namun dari hasil pengamatan penulis bahwa tidak sepenuhnya masukan atau aspirasi warga dijalankan sesuai dengan keinginan.

5. Menumbuhkan, Mengembangkan, dan Menggerakkan Prakarsa, Partisipasi, Swadaya serta Gotong Royong Masyarakat

Dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat merupakan bentuk terwujudnya suatu persatuan.

Dari hasil wawancara penulis bersama informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi LPMK untuk menumbuhkan partisipasi dan semangat gotong royong swadaya masyarakat sudah berjalan cukup baik, disini dapat penulis nilai dari kegiatan-kegiatan gotong royong yang LPMK laksanakan.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui program-program yang dibuat oleh LPMK dan pemerintahan Kelurahan demi kemajuan masyarakat dan pemerintah.

Gambar Aktivitas LPMK Bersama Warga dalam Pelaksanaan Sosialisasi Program LPMK Kelurahan Sukajaya



Sumber : Kantor Lurah Kelurahan Sukajaya

Hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa dalam turut serta mensejahterakan kehidupan keluarga, LPMK sebagai mitra pemerintahan cukup membantu dalam mensosialisasikan dan menerima seluruh laporan warga yang berhak dalam menerima bantuan dari pemerintah.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

Gambar LPMK bersama Pihak Kelurahan sedang melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kelurahan Sukajaya



Sumber : Kantor Kelurahan Sukajaya

Hasil wawancara diatas dapat penulis nilai bahwa kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh LPMK telah dilakukan, namun pelaksanaan yang diharapkan masih kurang untuk mencapai tujuan yang maksimal, karena dalam keanggotaan LPMK masih sangat kurang sumber daya manusia yang berusia muda padahal dalam keseimbangan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas perlu adanya peran kaum muda untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kreatifitas serta percepatan dalam ritme pembangunan.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan dua konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif, (Setiawan, 2004:39)

Mengacu pada pendapat Edward III, maka hasil penelitian diklasifikasi berdasarkan 4 indikator tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa LPMK telah disosialisasikan dengan baik kepada warga. Sosialisasi dilakukan melalui RT dan RW serta tokoh masyarakat.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis kepada informan bahwa bahwa

unsur pimpinan LPMK adalah sebanyak 6 orang dan mempunyai 10 unit kegiatan dengan anggota secara keseluruhan sebanyak 25 orang. Sedangkan dana anggaran didapat dari bantuan pemerintah daerah, swadya masyarakat dan sumbangan swasta yang tidak mengikat.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil analisa penullis bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pihak kelurahan dan juga LPMK telah berjalan baik. Ini dapat terlihat dari koordinasi yang dilakukan LPMK sebagai mitra pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian penulis bahwa didalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan telah dibuat struktur organisasinya, telah ditetapkan secara resmi oleh perda yang berlaku. Dimulai dari perekrutannya sampai tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6)

LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, antara lain :

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

LPMK bersama pihak kelurahan bekerjasama mengadakan pertemuan ataupun rapat yang dihadiri oleh para warga untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, setiap masukan-masukan yang dikemukakan oleh warga akan ditampung oleh LPMK yang di kemudian hari akan diwujudkan pelaksanaannya.

Hasil penelitian diatas dapat penulis analisa bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak warga dalam turut andil untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan kelurahan, warga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada LPMK yang nanti akan dibahas bersama pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan pelaksanaannya. Namun dalam menyerap seluruh aspirasi dari warga LPMK dirasa masih belum begitu maksimal, karena masih ada keluhan-keluhan warga yang mengindikasikan bahwa aspirasi warga

tidak sepenuhnya ada yang dilaksanakan ataupun terwujudkan.

2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

Dari Hasil temuan dan analisa, penulis dapat menilai bahwa usaha yang dilakukan pihak kelurahan dan LPMK dalam menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat sudah baik. Ini dapat dilihat dari terjadwalnya pertemuan antar pengurus LPMK, pihak kelurahan dan masyarakat setempat, adanya silaturahmi yang terjalin dalam pertemuan tersebut menjadikan setiap individu saling mengenal satu sama lain.

3. Meningkatkan Kualitas dan Mempercepat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Masyarakat Kelurahan

Dari hasil analisa penulis, penulis menilai bahwa dengan adanya LPMK di tengah masyarakat kelurahan, kegiatan pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan menjadi lebih terbantu karena dengan adanya peran LPMK, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai program-program yang dibuat oleh pemerintah.

4. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Mengendalikan, Melestarikan, dan Mengembangkan Hasil Pembangunan secara Partisipatif

Pengurus LPMK dalam menyusun rencana pembangunan secara prosedurnya selalu mengikut sertakan warga dan juga pihak kelurahan tentunya, para pengurus LPMK biasanya menyerap terlebih dahulu masukan-masukan dari warga pada saat rapat untuk menyusun rencana pembaangunan kedepannya yang akan dilaksanakan, setelah aspirasi warga telah ditampung barulah pengurus LPMK bersama pihak kelurahan merealisa sikannya ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan tentunya. Namun seluruh aspirasi masyarakat sebagian tidak dapat segera diwujudkan karena minimnya sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun dana.

Hasil analisa penulis mengungkapkan bahwa, dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan seutuhnya menjadi tanggung jawab LPMK sebagai pemrakarsa dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya peran LPMK tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa fungsi LPMK sudah berjalan cukup baik walaupun di dalam pelaksanaan pembangunan pastinya menemukan kendala, seperti sumber daya.

5. Menumbuhkan, Mengembangkan, dan Menggerakkan Prakarsa, Partisipasi, Swadaya Serta Gotong Royong Masyarakat

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan analisa bahwa fungsi LPMK dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat telah dilakukan pengurus LPMK secara baik, ini dapat dilihat dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK bersama pihak kelurahan dalam melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara gotong royong. Namun penulis juga melihat bahwa ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu masih minimnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat menganalisa bahwa fungsi LPMK meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan peran LPMK dalam melayani masyarakat agar lebih mudah dalam menerima informasi dan sosialisasi setiap program bantuan dari pemerintah. Namun penulis juga menilai bahwa, besarnya jumlah masyarakat dalam satu wilayah kelurahan tentu saja menjadi kendala bagi LPMK dalam mendata dan juga menyeleksi warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kurangnya sumber daya mengakibatkan kurang maksimalnya proses kerja.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian, penulis dapat menilai bahwa fungsi LPMK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pertemuan, penyuluhan dan pelatihan sudah tepat. Namun penulis menemukan kendala yang terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut yaitu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan kurang tepatnya jadwal yang dibuat panitia sehingga masih ada warga yang tidak bisa hadir.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6). Bahwa dalam pelaksanaan implementasi telah terlaksana dengan baik. Ditinjau dari komunikasi telah dilakukan

sosialisasi oleh pihak LPMK kepada masyarakat, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, serta sikap pelaksana yang antusias dan adanya struktur birokrasi yang jelas.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran hendaknya dapat memaksimalkan peranan LPMK dengan memberikan waktu, tempat serta sarana dan prasana yang lebih baik untuk menunjang kegiatan LPMK. Sehingga pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berjalan sesuai harapan. LPMK juga sebaiknya terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar aspirasi masyarakat yang telah diserap dapat diwujudkan satu per satu.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. 2002. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Elmore, Richard. 1979. *Backward Mapping: Implementation Research Decision dalam Political Science Quarterly* 94.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.
- H.B. Sutopo. 2002. Judul: *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Lipsky, M, 1971. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mardikanto, Totok, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 467 Hal.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- _____. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nugroho, Adi. 2006. *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika.

Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press

_____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Riyadi, Slamet. 1981. *Pembangunan Dasar-Dasar dan Pengertian*, hlm 16 2 Ibid. Hlm 17. Surabaya : Usaha Nasional.

Singarimbun dan Effendi, 2005. *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LPJES. Indonesia

Sudarmanto, Eko, dkk., 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung

Van Horn, Carl dan Van Meter, Donal. 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta

Wahab, Abdul Aziz,. 2011. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan)* (cetakan kedua). Bandung, Alfabeta.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. (Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group).

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Menjelaskan Bahwa Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Jurnal :

Abid Muhtarom. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*.
<https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/84>

Ricky Marvil Mawitjere. 2018. *Peranan Lembaga Pemberdaaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkuan Utara Kabupaten Minahasa*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/19815>

Septiani Putri Winata. 2016. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*.
<https://www.neliti.com/publications/199235/peran-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-kelurahan-dalam-memberdayakan-masyaraka-t-d>